



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.11.4/Kep. 257 -BKAD/2025

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA ILMAN
NIP. 19710507 200701 1 008 JABATAN JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN
SUMBER DAYA AIR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR,
PENATAAN RUANG, JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Saudara ILMAN NIP. 19710507 200701 1 008 Jabatan Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 23 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Saudara ILMAN NIP. 19710507 200701 1 008 Jabatan Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membebani Saudara ILMAN NIP. 19710507 200701 1 008 Jabatan Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara bertahap, atas Kerugian Daerah yang disebabkan kelalaian kehilangan kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) saat menjabat Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon berupa Sepeda Motor Nomor Polisi E 4823 K Merk/Type Kawasaki/KLX.1.5OG Tahun 2015.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara ILMAN NIP. 19710507 200701 1 008 Jabatan Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
4. Yth. Sdr. Ilman.

Telah diperiksa S.K. Pemberaan Kerugian daerah
terhadap Saudara Iman Nip. 19710507 1 008
Jabatan Juru operasi dan Pemeliharaan Sumber daya air
Unit Pelaksanaan teknis daerah Pengelolaan air, Penataan

Mengetahui ;	
Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan	
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	
Nama	Paraf
Linggauly	
Catatan :	
.....	
.....	



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
email : bkad.cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.1.11.4/ 222 /PBMD
Tanggal : 21 Februari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembebaan Kerugian Daerah terhadap Saudara ILMAN NIP. 19710507 200701 1 008 Jabatan Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

✓/✓
✓/✓

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Pasal 34 ayat (1) bahwa Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebaan Kerugian Daerah berdasarkan Dokumen SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Pembebaan Kerugian Daerah terhadap Saudara ILMAN NIP. 19710507 200701 1 008 Jabatan Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005